

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengalaman pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, ketika banyak di antara negara-negara Dunia Ketiga berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama ini. Semakin lama semakin banyak ekonom dan perumus kebijakan yang meragukan ketepatan dan kemampuan “tolak ukur GNP (*Gross National Product*)” sebagai indikator tunggal atas terciptanya kemakmuran dan kriteria pembangunan. Mulai muncul pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 1998: 17). Untuk Negara Sedang Berkembang (NSB) tolak ukurnya yaitu GDP (*Gross Domestic Product*) atau PDB (Produk Domestik Bruto).

Terjadi perubahan selama tiga dasawarsa terakhir ini, perhatian utama masyarakat perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonom dan politisi dari

semua negara, baik itu negara kaya maupun negara miskin, yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran, semuanya sangat mendambakan dan memomorsatukan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1998: 123).

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur. Pengertian adil dan makmur ini sebenarnya relatif, sehingga sulit dikuantifikasikan secara definitif. Namun demikian, jelas kiranya bahwa pertumbuhan ekonomi yang mantap (*steady growth*) dengan hasil pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan bukannya segolongan *elite* masyarakat saja, merupakan dua hal yang amat dikehendaki. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus mengubah struktur produksi nasional yang lebih baik, harus berhasil pula mengubah distribusi pendapatan nasional yang semakin merata (Soelistyo, et. al., 1981).

Pembangunan daerah di arahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Hakekat pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan tersebut dan mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah diperlukan suatu indikator. Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi pada suatu daerah.

TABEL 1.1.

PERKEMBANGAN PDRB D. I. YOGYAKARTA TAHUN 1987-2003

Tahun	PDRB Riil (juta rupiah)
1987	921.191
1988	976.436
1989	1.037.669
1990	1.085.093
1991	1.141.438
1992	1.220.607
1993	4.058.028
1994	4.387.074
1995	4.741.903
1996	5.111.563
1997	5.290.409
1998	4.685.777
1999	4.824.445
2000	5.017.709
2001	5.182.544
2002	5.395.054
2003	5.615.557

Sumber: *DIY dalam Angka*, BPS Propinsi DIY.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu propinsi di Indonesia yang telah melaksanakan pembangunan dengan menitikberatkan pembangunan di bidang ekonomi yang salah satu program pembangunannya adalah peningkatan status ekonomi wilayah yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi wilayah yang pesat dan stabil, disertai struktur yang berimbang dan dinamis di antara sektor-sektor ekonomi. Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di Propinsi D.I.

Yogyakarta dapat dilihat dari kenaikan dan penurunan PDRB dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik DIY). Dalam hal ini PDRB dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian.
2. Pertambangan dan penggalian.
3. Industri pengolahan.
4. Listrik, gas, dan air bersih.
5. Bangunan.
6. Perdagangan, hotel, dan restoran.
7. Pengangkutan dan komunikasi.
8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.
9. Jasa-jasa (BPS, Tahun dasar 1993).

Menurut Todaro (1998: 124), ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiganya adalah :

- 1) Akumulasi modal (penanaman modal).
- 2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja.
- 3) Kemajuan teknologi.

Sebenarnya yang menentukan PDB pada tingkat nasional (pada negara sedang berkembang) dan PDRB untuk tingkat daerah (propinsi) tidak hanya ketiga aspek di atas, melainkan juga faktor-faktor lain seperti faktor produksi sumberdaya alam, pajak, inflasi dan faktor sosial lainnya (Suparmoko, 1990: 178). Namun, masih ada banyak faktor lain yang mempunyai andil dalam mempengaruhi PDRB seperti pengeluaran

konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan ekspor netto (Statistik Indonesia, BPS).

Secara ekonomi makro, perlambatan kenaikan PDRB atau pertumbuhannya bukan satu-satunya ukuran yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah, karena alat pengukur pertumbuhan perekonomian lainnya yaitu pendapatan per jam kerja dan harapan hidup waktu lahir juga harus diperhitungkan untuk menilai keberhasilan pembangunan (Suparmoko, 1990: 177). Tingkat PDRB atau pertumbuhannya merupakan ukuran yang paling mudah dilihat dan diukur, untuk kemudian dapat dianalisa sektor-sektor mana saja yang mengalami peningkatan dan sektor-sektor mana yang mengalami penurunan. Dengan demikian dapat diambil suatu pelajaran untuk perbaikan ekonomi di masa akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai suatu perkembangan ekonomi di Propinsi DIY pada umumnya dan faktor-faktor yang mendorongnya, dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 1987-2002 “**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini dinyatakan sebagai berikut :

1. Apakah variabel laju inflasi berpengaruh terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti dan jika berpengaruh seberapa besar pengaruhnya?

2. Apakah variabel jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti dan jika berpengaruh seberapa besar pengaruhnya?
3. Apakah variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti dan jika berpengaruh seberapa besar pengaruhnya?
4. Apakah variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti dan jika berpengaruh seberapa besar pengaruhnya?
5. Apakah variabel penanaman modal asing (PMA) berpengaruh terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti dan jika berpengaruh seberapa besar pengaruhnya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel laju inflasi terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel jumlah angkatan kerja terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel penanaman modal dalam negeri terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel penanaman modal asing terhadap PDRB Propinsi DIY pada periode yang diteliti.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemda D.I. Yogyakarta, sebagai bahan masukan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan selanjutnya.
2. Untuk memberi informasi dan gambaran kepada pembaca dan pemerhati ekonomi yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan PDRB Propinsi DIY.
3. Bagi peneliti bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dalam meneliti masalah perkembangan PDRB, khususnya di Propinsi DIY.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum Subyek Penelitian.

Bab ini memberikan keterangan tentang situasi dan kondisi daerah atau wilayah DIY dan perkembangan varibel-variabel penelitian.

Bab III : Kajian Pustaka.

Bab ini memuat tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan.

**Bab IV : Landasan Teori dan Hipotesis.**

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian dan untuk memperkuat hipotesis yang dibuat dalam penelitian.

**Bab V : Metode Penelitian.**

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan.

**Bab VI : Analisis dan Pembahasan.**

Bab ini berisi tentang hasil-hasil perhitungan (pengolahan data) dan interpretasi hasil analisis statistik.

**Bab VII: Simpulan dan Implikasi.**

Bab ini berisi simpulan yang dapat diambil dari analisis penelitian dan implikasi kebijakan yang relevan dari hasil analisis penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

Bab ini merupakan gambaran secara umum atas subyek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian. Data-data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Propinsi D.I. Yogyakarta berbagai tahun dan dari buku-buku ekonomi.

#### **2.1. Tinjauan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **2.1.1 Keadaan Geografis**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu propinsi dari 30 propinsi di wilayah Indonesia dan terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Propinsi ini di bagian selatan dibatasi lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah Propinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut.
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara.
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat.
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut.

Posisi D.I. Yogyakarta yang terletak antara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'-110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80

km<sup>2</sup> atau 0,17 persen dari luas Indonesia (tidak termasuk Propinsi Timor-timur), merupakan propinsi terkecil setelah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

- Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km<sup>2</sup> (18,40 persen).
- Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km<sup>2</sup> (15,91 persen).
- Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> (46,62 persen).
- Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km<sup>2</sup> (18,04 persen).
- Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km<sup>2</sup> (1,02 persen).

#### **2.1.2 Pemerintahan**

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah bertanggung jawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif. Propinsi D.I. Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat I dikepalai oleh seorang Gubernur Kepala Daerah dengan Ibukota Propinsi adalah Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugasnya terdapat tiga organisasi perangkat staf pemerintahan daerah yaitu Sekretaris Daerah (Setda), Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dan Badan Pengawas Daerah.

Propinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota dengan 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa yaitu:

- Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa.
- Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa.
- Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa.

- Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.
- Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa.

### **2.1.3. Pendidikan**

Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada tahun 2002, jenjang perguruan tinggi negeri di Propinsi D.I.Yogyakarta memiliki UGM, UNY, IAIN Sunan Kalijaga, ISI, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional (STPN) dan Akademi Teknik Kulit (ATK) dengan jumlah mahasiswa keseluruhan sebanyak 83.006 orang, yang diajar 3.991 dosen tetap dan 1.502 dosen tidak tetap.

Adapun jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tercatat sebanyak 100 institusi dengan rincian 45 akademi, 26 sekolah tinggi, 18 universitas serta masing-masing 6 politeknik dan 5 institut yang diasuh oleh 10.417 orang dosen.

### **2.1.4. Agrikultura**

#### **2.1.4.1. Tanaman Pangan**

Pada tahun 2002, produksi padi tercatat sebesar 653.577 ton (mengalami penurunan sebesar 1,24 persen dari tahun 2001), dengan rincian 82,31 persen merupakan padi sawah dan 17,69 persen padi ladang. Dengan luas panen masing-masing sebesar 98.049 ha dan 36.799 ha diperoleh angka produktivitas sebesar 5,49 ton per ha untuk padi sawah dan 3,14 ton per ha untuk padi ladang.

Produksi palawija didominasi oleh komoditas ketela pohon sebesar 750.205 ton, komoditas jagung sebesar 170.753 ton serta kacang tanah dan kacang kedelai masing-masing 58.482 ton dan 50.981 ton, serta ketela rambat dan kacang hijau relatif kecil masing-masing 7.100 ton dan 462 ton.

#### **2.1.4.2. Perkebunan**

Dari segi produksi, tanaman perkebunan yang cukup potensial di Propinsi DIY adalah kelapa dan tebu. Setelah mengalami penurunan produksi pada tahun 2001, pada tahun 2002 produksi masing-masing komoditas mencapai 42.273 ton dan 13.666 ton. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu sebesar 3,60 persen dan 8,10 persen.

#### **2.1.5. Perdagangan**

##### **2.1.5.1. Perdagangan Dalam Negeri**

Ketersediaan bahan pokok strategis seperti beras memperoleh perhatian Pemerintah dalam hal pengadaan dan distribusi guna mengendalikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Pada tahun 2002, persediaan beras yang dikuasai oleh Depot Logistik (DOLOG) mencapai 65.551,06 ton atau naik 41,52 persen dari tahun 2001 dan disalurkan sebesar 48.474,56 ton (73,95 persen). Alokasi penyaluran beras terbesar adalah untuk Operasi Pasar Khusus yaitu 89,50 persen, ABRI 9,29 persen, dan selebihnya 1,21 persen untuk konsumen lainnya.

##### **2.1.5.2. Ekspor dan Impor**

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi D.I. Yogyakarta mencatat nilai ekspor daerah ini tahun 2002 mencapai US\$ 110,14 juta, naik

sebesar 9,02 persen dari tahun 2001 sebesar US\$ 101,028 juta. Kenaikan ini diikuti dengan meningkatnya volume ekspor sebesar 0,92 persen dari 36,89 ribu ton pada tahun 2002. Sebagian besar produk di ekspor melalui Tanjung Mas sebagai pelabuhan laut terdekat dengan Propinsi DIY yakni sekitar 91,99 persen.

Peningkatan nilai ekspor 3 tahun terakhir ini mengisyaratkan mulai membaiknya perekonomian DIY akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 (setelah dua tahun sebelumnya yaitu tahun 1998 dan 1999 mengalami penurunan).

Menurut komoditas, pada tahun 2002 impor yang bernilai sebesar US\$ 11,32 juta didominasi oleh impor kapas sebesar 25,68 persen, asesoris dan bahan baku susu masing-masing sebesar 22,19 persen dan 20,62 persen, serta sisanya 31,51 persen komoditas lainnya.

#### **2.1.6. Keuangan Daerah**

Berdasarkan data RAPBD Propinsi D.I. Yogyakarta tahun 2002, penerimaan daerah tercatat sebesar Rp. 481,64 Miliar, naik 5,44 persen dibanding realisasi tahun 2001 yang sebesar Rp. 456,77 Miliar. Sebagian besar penerimaan berasal dari Dana Alokasi Umum (Sumbangan) mencapai 44,53 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah 35,19 persen.

## **2.2. Tinjauan Umum Variabel yang Diamati**

### **2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan

rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Untuk PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil ukuran ekonomi suatu wilayah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat dari struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

Nilai PDRE atas dasar harga berlaku Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2002 tercatat sebesar Rp. 16.712.888 dengan PDRB per kapita sebesar Rp. 5.277.697. Berdasarkan komposisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa peran sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Propinsi DIY mulai tergeser oleh sektor-sektor lainnya.

TABEL 2.1.

PDRB DIY MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN TAHUN 1998-2002

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
	(Rp. Juta)	(1993=100) (Rp. Juta)
1998	9.725.417	4.685.777
1999	11.762.984	4.824.445
2000	13.093.979	5.017.709
2001	14.576.885	5.182.544
2002	16.712.888	5.395.054

Sumber: *DIY dalam Angka*, BPS Propinsi DIY.

Tabel 2.1, hanya menggambarkan perkembangan PDRB dari beberapa tahun terakhir, namun kenyataannya dari tahun ke tahun PDRB selalu mengalami kenaikan yang membaik. Menurut publikasi BPS Propinsi DIY

(DIY dalam Angka, 2002), berdasarkan perhitungan PDRB atas harga konstan, perekonomian DIY tahun 2002 tumbuh sekitar 3,38 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,29 persen. Meskipun sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,75 persen, namun sektor-sektor lainnya tumbuh positif.

### **2.2.2. Laju Inflasi**

Kenaikan harga tercermin dari angka inflasi dan laju inflasi merupakan salah satu yang menggambarkan stabilitas ekonomi secara makro di suatu wilayah. Laju inflasi Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2002 mencapai angka dua digit yakni sebesar 12,01 persen, lebih rendah dibanding tahun 2001 yang sebesar 12,56 persen. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi relatif tinggi terjadi pada kelompok perumahan dan kelompok pendidikan masing-masing yaitu 15,41 persen dan 15,07 persen. Kemudian kelompok kesehatan 14,49 persen, kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 14,30 persen. Adapun kelompok makanan jadi, bahan makanan, dan sandang masing-masing yaitu 11,03 persen, 7,67 persen, dan 3,82 persen.

Besarnya kecilnya laju inflasi dapat digolongkan berdasarkan parah tidaknya inflasi. Laju inflasi di Propinsi DIY pada tahun 1997 ke tahun 1998 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan ini diperkirakan akibat pengaruh krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Pada tahun 1998 laju inflasi sebesar 77,46 persen digolongkan sebagai inflasi berat (antara 30-100%), namun, pada tahun 1999 laju inflasi mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 2,51 persen (inflasi ringan, <10%),

yang dikarenakan telah melewati masa pergantian periode kepresidenan Republik Indonesia baru pada tahun 1998. Pada tahun 2001 mengalami kenaikan yang mencuat lagi menjadi 12,56 persen (inflasi sedang, antara 10-30%). Namun tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 12,01 setelah melewati masa pemilihan presiden untuk kedua kalinya tahun 2001 yang menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia.

TABEL 2.2.

LAJU INFLASI D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 1997-2002

Tahun	Laju Inflasi (%)
1997	12,72
1998	77,46
1999	2,51
2000	7,32
2001	12,56
2002	12,01

Sumber: *Indikator Ekonomi*, BPS Propinsi DIY.

### 2.2.3. Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Propinsi DIY mempunyai peran yang sangat besar dalam menunjang kegiatan ekonomi dan mendorong kenaikan PDRB. Berdasarkan hasil Susenas 2002, persentase penduduk DIY umur 10 tahun ke atas menurut kegiatan adalah 64,45 persen merupakan angkatan kerja (59,69 persen bekerja dan 4,77 persen mencari pekerjaan), sedangkan sisanya sebesar 35,59 persen merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing adalah 19,05 persen, 11,69 persen, dan 4,81 persen). Untuk berdasarkan lapangan usaha utama,



penduduk yang bekerja bergerak pada sektor pertanian 39,19 persen, perdagangan 19,95 persen, jasa 15,69 persen, industri 13,95 persen, sisanya 11,22 persen di sektor-sektor lainnya.

Gambaran tenaga kerja di sektor swasta berdasarkan data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mencatat jumlah pendaftar pencari kerja pada tahun 2002 sebanyak 106.923 orang, meningkat sekitar 21,83 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 83.582 orang. Mereka terdiri dari 52,63 persen laki-laki dan 47,37 persen perempuan, yang mana dari jumlah tersebut 63,25 persen berpendidikan SLTA, 28,22 persen Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana, serta 7,28 persen adalah SLTP dan sisanya 1,25 persen berpendidikan SD.

TABEL 2.3.

JUMLAH ANGKATAN KERJA D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 1998-2002

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)
1998	1.507.040
1999	1.624.079
2000	1.724.775
2001	1.699.175
2002	1.734.626

Sumber: *Statistik Indonesia*, BPS Propinsi DIY.

Dapat dilihat pada tabel 2.3, di tahun 1998 jumlah angkatan kerja di Propinsi DIY sebesar 1.507.040 jiwa, pada tahun 1999 sebesar 1.624.079 jiwa atau mengalami kenaikan 7,2 persen, dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2000 sebesar 1.724.775 jiwa atau 5,8 persen. Namun pada tahun 2001 terjadi penurunan sebesar 1,5 persen menjadi 1.699.175 jiwa. Pada tahun

2002 mengalami kenaikan lagi yang lebih besar dari pada tahun 2001 sebesar 1.734.626 jiwa.

#### 2.2.4. Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) merupakan salah satu bentuk akumulasi modal yang mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung intens sejak awal kelahiran ilmu ekonomi.

TABEL 2.4.

#### REALISASI PMDN D.I. YOGYAKARTA YANG DISETUJUI PEMERINTAH TAHUN 1987-2002

Tahun	Investasi (Rp. Miliar)	Tahun	Investasi (Rp. Miliar)
1987	6,3	1995	39,6
1988	189,87	1996	222,5
1989	47,46	1997	235,6
1990	420,3	1998	6
1991	334,3	1999	67,94
1992	116,9	2000	119,9
1993	270,6	2001	105,9
1994	422,6	2002	43,4

Sumber: *Statistik Indonesia*, BPS Propinsi DIY.

Perkembangan PMDN di Propinsi DIY selama kurun waktu 16 tahun terakhir cukup menggembirakan. Banyaknya proyek-proyek penanaman modal dalam negeri yang telah terealisasi pemerintah dari tahun 1987 sampai tahun 2002 di mana investasi tertinggi di tahun 1994 sebesar Rp. 422,6 Miliar dan investasi terendah di tahun 1998 sebesar Rp. 6 Miliar yang dikarenakan pada tahun tersebut tidak stabilnya perekonomian di Indonesia didukung sektor-sektor lainnya sedang tidak membaik.

### **2.2.5. Jumlah Penduduk**

Pada teori pertumbuhan ekonomi menurut Smith, sumber daya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat (Lincoln Arsyad, 1992: 50).

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk tahun 2002, jumlah penduduk D.I. Yogyakarta tercatat 3.166.701 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk perempuan 50,52 persen dan penduduk laki-laki 49,98 persen. Menurut kewarganegaraan, persentase penduduk WNI mencapai 99,96 persen dan selebihnya 0,04 persen adalah WNA.

Berdasarkan hasil Susenas, komposisi kelompok umur penduduk D.I. Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu 20-24 tahun sebesar 10,39 persen dan kelompok umur lanjut usia dewasa yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 14,52 persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.

### **2.2.6. Penanaman Modal Asing**

Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) yang disetujui oleh pemerintah di Propinsi DIY ada sejak awal tahun 1990, berarti pada tahun sebelum tahun 1990 di D.I. Yogyakarta belum ada pelaksanaan penanaman modal asing. Hal ini dikarenakan tidak adanya proyek-proyek investasi dari para investor-investor asing di DIY atau pun masalah kebijakan pemerintah pusat. Perkembangan PMA dari tahun ke tahun dengan nilai investasi tidak

menentu, kadang rendah kadang tinggi.

Dapat dilihat pada tabel 2.5, pada awal investasi asing yaitu tahun 1990 hanya menanamkan investasi sebesar US\$ 4.295.122, yang kemudian meningkat pesat menjadi US\$ 37.705.598 di tahun 1991. Terjadi peningkatan terus menerus sampai pada tahun 1993 sebesar US\$ 55.864.185, ini dikarenakan adanya pergantian kepresidenan di negara kita pada tahun tersebut. Investasi asing tertinggi terjadi pada tahun 1996 yaitu sebesar US\$ 57.956.965, ini dikarenakan pada tahun tersebut Indonesia mulai mengalami ketidakstabilan ekonomi yang dilanjutkan oleh krisis moneter yang berdampak terjadinya kenaikan kurs valuta asing, maka para investor asing berlomba-lomba untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya dan di D.I. Yogyakarta pada khususnya. Selanjutnya hingga tahun 2002, PMA hanya sebesar US\$ 1.051.000.

TABEL. 2.5.

PERKEMBANGAN PMA D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 1987-2002

Tahun	PMA (US\$)	Tahun	PMA (US\$)
1987	0	1995	631.240
1988	0	1996	57.956.965
1989	0	1997	14.981.700
1990	4.295.122	1998	7.462.157
1991	37.705.598	1999	9.538.364
1992	53.048.878	2000	4.092.000
1993	55.864.185	2001	7.059.900
1994	631.240	2002	1.051.000

Sumber: Laporan PMA D.I. Yogyakarta, BAPEDA Propinsi DIY.

### BAB III

#### KAJIAN PUSTAKA

Tujuan diadakannya kajian pustaka adalah mendokumentasikan dan mengkaji hasil-hasil dari penelitian-penelitian yang pernah ada pada area yang sama maupun pada area yang berbeda. Dari kajian ini dapat ditemukan kelemahan atau kekurangan pada penelitian yang lalu dan penting untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada serta sekaligus dapat menghindari duplikasi.

- ❖ Pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yunizarrahman (UII, 2002) yang diberi judul yaitu: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB di Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 1985-1999”. Dalam penelitian tersebut digunakan program TSP (*Time Series Processor*) dengan model analisis regresi kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*).

Bentuk model persamaannya :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + U_i$$

Keterangan : Y : PDRB Riil Kal-Sel

X<sub>1</sub> : Laju inflasi (%)

X<sub>2</sub> : Jumlah angkatan kerja (jiwa)

X<sub>3</sub> : Penanaman modal asing (ribu US\$)

Hasil estimasi regresinya yaitu sebagai berikut :

$$Y = -1726302,5 - 788,37492X_1 + 4,3139774X_2 + 0,8357180X_3 + U_i$$

Pada hipotesis awal menyebutkan bahwa secara parsial masing-masing variabel penjelas diduga berpengaruh terhadap variabel dependen, namun dugaan tersebut sedikit melenceng, karena variabel laju inflasi ( $X_1$ ) ternyata secara statistik tidak berpengaruh terhadap PDRB Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar -0,228 dan t-tabel sebesar 1,782 (5%;12), menunjukkan t-hitung < t-tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak signifikan) secara statistik. Berarti bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB Kalimantan Selatan, yang maknanya adalah setiap kenaikan atau penurunan laju inflasi sama sekali tidak berpengaruh terhadap besar kecinya PDRB di Kalimantan Selatan.

Variabel jumlah angkatan kerja dan penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kalimantan Selatan, di mana variabel jumlah angkatan kerja ( $X_2$ ) didapat t-hitung sebesar 5,137 dan t-tabel sebesar 1,782 (5%;12), menunjukkan t-hitung > t-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan terima  $H_a$ . Hal ini berarti variabel  $X_2$  signifikan dan berpengaruh positif terhadap PDRB Kalimantan Selatan, dengan pengaruhnya sebesar 4,3139774, yang artinya setiap kenaikan jumlah angkatan kerja sebesar 1 jiwa akan menyebabkan kenaikan PDRB sebesar 4,3 juta rupiah, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Untuk variabel Penanaman Modal Asing ( $X_3$ ), setelah dihitung diperoleh t-hitung sebesar 2,750 dan t-tabel sebesar 1,782 (5%;12), menunjukkan t-hitung > t-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan terima  $H_a$ . Hal ini berarti variabel  $X_3$  signifikan dan berpengaruh positif terhadap PDRB Kalimantan Selatan, dengan pengaruhnya sebesar 0,8357180 yang artinya setiap kenaikan PMA

sebesar 1 ribu US\$ akan menyebabkan kenaikan PDRB sebesar 0,84 juta rupiah, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Penelitian skripsi yang dilakukan penulis memiliki beberapa perbedaan yaitu :

- Judul skripsi meliputi area penelitian dan periode waktu penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta dan mengambil rentang waktu penelitian dari tahun 1987 sampai tahun 2002, dikarenakan data yang diperoleh dari instansi pemerintahan tidak mempublikasikan data pada tahun sebelum tahun 1987 dan diambil tahun akhir yaitu tahun 2002, dikarenakan adanya perubahan tahun dasar menurut harga konstan terjadi lagi pada tahun 2003, maka tidak memasukkan tiga tahun dasar sekaligus yaitu tahun 1983, 1993, dan 2003, karena dapat menemui kesulitan dalam penentuan satu tahun dasar.
- Variabel-variabel yang diajukan. Terdapat sedikit kesamaan penggunaan variabel penjelas yaitu laju inflasi, jumlah angkatan kerja, dan penanaman modal asing. Namun penulis menambahkan dua variabel lagi yaitu penanaman modal dalam negeri dan jumlah penduduk, dengan alasan untuk meneliti apakah kedua variabel tersebut memberikan kontribusi dalam perekonomian Provinsi DIY.
- Media olah data komputer menggunakan aplikasi statistik *EViews*.
- ❖ Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto Anggoro (UPN, 2003) yang diberi judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sleman Kurun Waktu Tahun 1991-2000". Dalam penelitian terse-

but digunakan program SPSS dengan model analisis OLS.

Model persamaannya :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + U$$

di mana :  $Y$  = Laju pertumbuhan ekonomi daerah Sleman (%)

$X_1$  = Laju pertumbuhan pengeluaran pembangunan daerah (%)

$X_2$  = Laju pertumbuhan tingkat investasi swasta (%)

$X_3$  = Laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja (%)

Hasil estimasi regresi dapat ditulis dengan persamaan :

$$Y = 8,6251 + 0,011X_1 - 0,599X_2 + 0,129X_3 + U$$

Hasil pengujian secara parsial dengan uji satu sisi sebelah kanan menunjukkan, variabel  $X_1$  diperoleh t-hitung = 0,146 dan t-tabel = 2,447 (5%;7). Dapat diambil kesimpulan, karena t-hitung < t-tabel maka  $H_0$  diterima dan tolak  $H_a$ . Hal ini berarti variabel  $X_1$  tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah Sleman ( $Y$ ). Dengan anggapan, apabila variabel  $X_1$  mengalami kenaikan 1 % maka variabel  $Y$  akan mengalami penurunan sebesar 0,011 %, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Pengujian secara parsial variabel  $X_2$  diperoleh t-hitung = -2,262 dan t-tabel = 2,447 (5%;7). Dapat diambil kesimpulan, karena t-hitung < t-tabel maka  $H_0$  diterima dan tolak  $H_a$ . Hal ini berarti variabel  $X_2$  tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah Sleman. Dengan anggapan, apabila variabel  $X_2$  mengalami kenaikan 1 % maka variabel  $Y$  akan mengalami penurunan sebesar 2,262 %, dengan asumsi *ceteris paribus*.



Pengujian secara parsial untuk variabel  $X_3$  diperoleh t-hitung = 0,832 dan t-tabel = 2,447 (5%;7). Dapat diambil kesimpulan, karena t-hitung < t-tabel maka  $H_0$  diterima dan tolak  $H_a$ . Hal ini berarti variabel  $X_3$  tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah Sleman. Dengan anggapan, apabila variabel  $X_3$  mengalami kenaikan 1 % maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,832 %, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Tanggapan penulis, jika suatu variabel penjelas tidak signifikan terhadap variabel terikat maka variabel tersebut pun tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini salah menginterpretasikan hasil uji t yang diperoleh. Hasil analisis membuktikan bahwa telah jelas semua variabel penjelas tidak signifikan maka tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi besar kecilnya semua variabel penjelas tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman pada periode penelitian.

Penelitian skripsi yang dilakukan penulis memiliki perbedaan yaitu :

- Pada judul meliputi area penelitian dan periode waktu penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian yang agak luas yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta secara keseluruhan termasuk Kabupaten Sleman di dalamnya dan rentang waktu penelitian yang sedikit lebih luas juga yaitu dari tahun 1987 sampai tahun 2002.
- Variabel-variabel penelitian yang diajukan.
- Media olah data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi statistik *EVIIEWS*.

- ❖ Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siske Agustin Puspasari (UPN, 2004) ini diberi judul yaitu “Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman Periode Tahun 1987-2002.” Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan program TSP dengan model analisis OLS.

Model persamaan regresi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu_i$$

di mana :  $Y = \text{PDRB}$

$X_1 = \text{Pengeluaran rutin pemerintah}$

$X_2 = \text{Pengeluaran pembangunan pemerintah}$

Kemudian dari fungsi regresi linier berganda di atas dikembangkan dalam bentuk “*Logaritma Natural*” untuk memperkecil sebaran data yang ada.

Bentuk persamaan log linier sebagai berikut:

$$\text{Ln PDRB}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln APBD}_{Rt} + \beta_2 \text{Ln APBD}_{Pt} + \mu_i$$

di mana,  $\text{Ln PDRB}_t = \text{PDRB pada tahun } t \text{ (log linier)}$

$\text{Ln APBD}_{Rt} = \text{Pengeluaran rutin pada tahun } t \text{ (log linier)}$

$\text{Ln APBD}_{Pt} = \text{Pengeluaran pembangunan pada tahun } t \text{ (log linier)}$

Dari hasil analisis regresi diperoleh :

$$\text{Ln } Y = 9,351 + 0,003 \text{ Ln } X_1 + 0,278 \text{ Ln } X_2 + \mu_i$$

Interpretasi koefisien regresi setiap parameter :

- $\beta_1 = 0,003$

Mempunyai arti positif dan menunjukkan hubungan searah yang dapat diartikan bahwa apabila pengeluaran rutin pemerintah bertambah sebesar 1%

maka PDRB bertambah sebesar 0,003% dengan asumsi faktor lain tetap. Hal ini dapat dikaitkan dengan uji t, di mana diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,1654 dan t-tabel sebesar 2,144 (5%;13), menunjukkan  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka Hipotesa nol diterima. Ternyata untuk variabel ini tidak signifikan secara statistik maka tidak berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Sleman periode tahun 1987-2002. Jadi, nilai koefisien variabel ini tidak berarti apa-apa dalam mempengaruhi PDRB.

-  $\beta_2 = 0,278$

Mempunyai arti positif dan menunjukkan hubungan searah yang dapat diartikan bahwa apabila pengeluaran pembangunan pemerintah bertambah sebesar 1 % maka PDRB bertambah sebesar 0,278 % dengan asumsi faktor lain tetap. Hal ini dapat dikaitkan dengan uji t, di mana nilai t-hitung sebesar 9,7074 dan t-tabel sebesar 2,144 (5%;13), menunjukkan  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka Hipotesa alternatif diterima. Ternyata untuk variabel ini signifikan secara statistik dan berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Sleman periode tahun 1987-2002. Jadi, nilai koefisien variabel ini sesuai dengan pengujian t-statistik yang mana pengaruhnya positif terhadap PDRB. Dengan kata lain PDRB akan meningkat 0,278 % jika variabel ini naik 1%.

## BAB IV

### LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

#### 4.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Secara singkat pada awalnya pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut ada tekanannya pada tiga aspek yaitu: *proses, output per kapita, dan jangka panjang*. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Terdapat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Terdapat dua sisi yaitu sisi output totalnya (PDRB) dan sisi jumlah penduduknya, karena output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Hanya kedua sisi tersebut yang bisa dijelaskan, maka perkembangan output per kapita bisa dijelaskan (Boediono, 1982: 1).

Aspek yang ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun lebih) diikuti kenaikan output per kapita. Proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self generating* yang artinya bahwa proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri

menelorkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Boediono, 1982: 2).

Selanjutnya, terdapat perbedaan pengertian pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Para ekonom yang membedakan kedua pengertian tersebut mengartikan istilah *pembangunan ekonomi* sebagai:

- 1) Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP di suatu negara tertentu pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau;
- 2) Perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya.

Istilah *pertumbuhan ekonomi* diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang berkembang (Arsyad, 1992: 15).

#### **4.2. Teori Pembangunan Ekonomi**

Menurut pandangan para ahli ekonomi pembangunan tentang jenis-jenis teori pembangunan, sebagian dari teori pembangunan ekonomi tersebut sebenarnya lebih tepat disebut sebagai teori pertumbuhan ekonomi karena tekanan analisisnya lebih pada faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan

pendapatan nasional. Teori pembangunan yang ada juga kadang-kadang lebih tepat disebut sebagai “model pembangunan ekonomi” karena tekanan analisisnya yang lebih spesifik pada kondisi tertentu serta asumsi-asumsi yang disertakan padanya yang menuntut diterapkannya analisis tersebut pada keadaan dan waktu dalam sebuah perekonomian tertentu.

Jika beberapa teori pembangunan ekonomi lebih tepat disebut sebagai model pembangunan ekonomi, maka demikian pula halnya beberapa dari teori pertumbuhan ekonomi akan lebih tepat disebut “model pertumbuhan ekonomi”. Dengan demikian, kita akan mengartikan itu semua secara umum sebagai teori pembangunan ekonomi (Hakim, 2002: 62).

#### 4.2.1. W. W. Rostow

Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ekonom. Teori ini pada mulanya merupakan artikel yang dimuat dalam *Economics Journal* (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linier (*linear stages model*).

Rostow membedakan proses pembangunan ekonomi ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions to take-off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*) [Arsyad, 1992: 41].

Dasar perbedaan proses pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Kelima tahap proses pembangunan ekonomi menurut Rostow, sebagai berikut (Arsyad, 1992: 42-48):

1. Masyarakat Tradisional

Yang dimaksud dengan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi masih relatif primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional.

Dalam tahap ini, tingkat produktivitas per pekerja masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian.

2. Prasyarat Tinggal Landas

Pada tahap ini didefinisikan sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

Seperti yang telah diungkapkan, Rostow sangat menekankan perlunya perubahan-perubahan yang multidimensional, karena ia tidak yakin akan kebenaran pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan

akan dapat dengan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditingkatkan.

Kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Peranan sektor pertanian tersebut antara lain: (1) kemajuan pertanian menjamin persediaan bahan makanan bagi penduduk di pedesaan maupun di perkotaan.. Hal ini menjamin agar penduduk tidak kelaparan dan agar bahan impor bahan makanan bisa dihindari; (2) kenaikan produktivitas di sektor pertanian akan memperluas pasar dari kegiatan industri.

### 3. Tinggal Landas

Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awalnya, terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, tercapainya kemajuan yang pesat dalam inovasi (peningkatan investasi), dan terbukanya pasar-pasar baru. Rostow mengemukakan 3 ciri utama dari negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas yaitu:

- a. Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari Produk Nasional Bersih (*Net National Product*).
- b. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (*leading sectors*).
- c. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa mencapai perkembangan sektor modern dan eksternalitas



ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

Di sini juga termasuk kemampuan negara tersebut untuk mengerahkan sumber-sumber modal dalam negeri, karena “kenaikan tabungan” dalam negeri peranannya besar sekali dalam menciptakan tahap tinggal landas. Contohnya, Inggris dan Jepang mencapai tahap ini tanpa mengimpor modal sama sekali.

#### 4. Menuju Kedewasaan

Pada tahap kedewasaan diartikan sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin (*leader sectors*) baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang mengalami kemunduran, dengan coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan juga oleh kebijakan pemerintah. Kebanyakan negara-negara maju yang mengalami tahap ini. Di Inggris, misalnya, industri tekstil yang telah mempelopori pembangunan pada tahap tinggal landas telah digantikan dengan industri besi, batu bara, peralatan listrik.

#### 5. Masa Konsumsi Tinggi

Masa konsumsi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah pro-

duksi. Pada tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat (negara) yaitu:

- a. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri, dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.
- b. Menciptakan “negara kesejahteraan” (*welfare state*) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progressif.
- c. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok, meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

#### 4.2.2. Adam Smith

Ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Agar inti dari proses pertumbuhan menurut Smith ini mudah dipahami, kita bedakan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu (Arsyad, 1992: 49-51):

##### 1. Pertumbuhan Output Total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada 3 yaitu:

- a. Sumber daya alam yang tersedia, menurutnya unsur ini merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang

peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya tersebut digunakan secara penuh.

- b. Sumber daya insani (jumlah penduduk), mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
- c. Stok barang modal yang ada, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber daya alam).

## 2. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat.

Tingkat upah yang berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga ( $D_L$ ) tumbuh lebih cepat daripada penawaran tenaga kerja ( $S_L$ ), di mana permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat.

#### 4.2.3. David Ricardo

Garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal yang kita kenal dengan istilah "*the law of diminishing returns*". Selama buruh yang dipekerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, maka tenaga kerja akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi produk marginal tenaga kerja yang pada gilirannya akan menekankan tingkat upah ke bawah (Arsyad, 1992: 52-53).

Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Artinya, bisa memperlambat bekerjanya *law of diminishing returns* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo.

#### 4.2.4. Solow-Swan

Arsyad (1992: 55-57), menyebutkan bahwa Robert Solow dan Trevor Swan merupakan salah satu tokoh ekonomi pada mazhab Neo-Klasik. Teori

pertumbuhan ekonomi ini tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (*capital-output ratio* = COR) bisa berubah. Dengan kata lain, untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan, maka tenaga k.erja yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebaliknya jika modal yang digunakan lebih sedikit, maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya “keluwesan“ (fleksibilitas) ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

Teori pertumbuhan Neo-Klasik Solow dan Swan dipergunakan suatu fungsi produksi yang lebih umum, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L). Bentuk fungsi produksi ini adalah:

$$Q_t = K_t^a L_t^b$$

di mana:

$Q_t$  = Tingkat produksi pada tahun  $t$

$K_t$  = Jumlah stok barang modal pada tahun  $t$

$L_t$  = Jumlah tenaga kerja pada tahun  $t$

$a$  = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan 1 unit modal

$b$  = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja

Pada umumnya nilai  $a$  dan  $b$  ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa  $a + b = 1$ , yang berarti bahwa  $a$  dan  $b$  nilainya adalah sama dengan batas produksi dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain  $a$  dan  $b$  ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

#### 4.2.5. Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan R.F. Harrod. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal "*American Economic Review*", sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam "*Economic Journal*". Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara sendiri-sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka sekarang ini dikenal sebagai teori Harrod-Domar.

Teori Harrod-Domar itu merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan

masalah-masalah ekonomi jangka panjang, sedangkan teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu:

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri dari 2 sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio* = ICOR).

Model pertumbuhan ekonomi yang sederhana dari Harrod-Domar:

- 1). Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), oleh karenanya persamaan yang sederhana:

$$S = s.Y \quad (i)$$

- 2). Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan  $\Delta K$ , maka:

$$I = \Delta K \quad (ii)$$

Karena stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan output total (Y), seperti ditunjukkan oleh COR (k), maka:

$$k = \frac{K}{Y} = \text{atau} \quad \frac{\Delta K}{\Delta Y} \quad \text{atau} \quad \Delta K = k \cdot \Delta Y \quad (\text{iib})$$

3). Akhirnya, karena tabungan total (S) harus sama dengan investasi total (I), maka:

$$S = I \quad (\text{iii})$$

$$S = s \cdot Y \quad \text{dan} \quad I = \Delta K, \quad \text{atau} \quad \Delta K = k \cdot \Delta Y, \quad \text{maka}$$

$$s \cdot Y = k \cdot \Delta Y$$

dan akhirnya didapatkan:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \quad (\text{iv})$$

Persamaan (iv) merupakan persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal-output (k).

Secara lebih spesifik, persamaan itu menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan dan diinvestasikan, makin tinggi pula output. Sebaliknya hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif (Arsyad, 1992: 57-61).

#### 4.3. Produk Domestik Regional Bruto

Publikasi BPS DIY (berbagai edisi) menjelaskan bahwa salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto



(PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Lebih lanjut, perkembangan PDRB antara lain mencerminkan struktur ekonomi suatu daerah sekaligus memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat dan kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ada tiga (3) macam pendekatan perhitungan PDRB yaitu:

1. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun.
2. Pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima

atas faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji untuk tenaga kerja, sewa atas tanah atau mesin, bunga atas modal dan keuntungan atas usaha yang dijalani, yang semuanya sebelum dikurangi pajak penghasilan dan pajak tidak langsung lainnya.

3. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Ekspor netto di sini adalah ekspor dikurangi impor.

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan atas faktor-faktor produksi.

#### **4.4. Inflasi**

##### **4.4.1. Pengertian Inflasi**

Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama, mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan

persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2000: 25).

#### 4.4.2. Jenis-Jenis Inflasi

##### 4.4.2.1 Inflasi Menurut Sebabnya

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar. Jenis inflasi ini dapat dibedakan menjadi 2 macam:

a. Demand-pull Inflation

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total di samping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi (output). Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanya menaikkan harga saja (disebut dengan inflasi murni).

b. Cost-push Inflation

Cost-push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi, artinya inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Kalau proses ini berjalan terus maka timbullah cost-push inflation.

#### 4.4.2.2. Inflasi Menurut Parah Tidaknya

Jenis inflasi ini dapat dibedakan menjadi 4 macam:

- 1). Inflasi ringan (di bawah 10% setahun).
- 2). Inflasi sedang (antara 10-30% setahun).
- 3). Inflasi berat (antara 30-100% setahun).
- 4). Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

Sebetulnya kita tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang menanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Misalnya, laju inflasi sebesar 20 persen dan semuanya berasal dari kenaikan harga dari barang-barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita menamakannya inflasi yang parah (Boediono, 1998: 162).

#### 4.4.2.3. Inflasi Menurut Asalnya

Jenis inflasi ini dapat dibedakan:

- 1). Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).
- 2). Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Inflasi yang berasal dalam negeri timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara lain langganan berdagang. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan: (1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena

sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, (2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi (dan kemudian, harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor (*cost-inflation*), (3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena kemungkinan kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga barang impor tersebut (*demand inflation*) [Boediono, 1998: 164].

#### 4.4.3. Tingkat Harga dan Laju Inflasi

Richard G. Lipsey (1992) menerangkan bahwa untuk mempelajari inflasi, para pakar ekonomi menggunakan dua konsep. Yang pertama adalah “tingkat harga” yang artinya tingkat rata-rata semua harga dalam sistem ekonomi. Yang kedua adalah “laju inflasi” yang berarti laju kenaikan tingkat harga secara umum. Tingkat harga dan laju inflasi diukur dengan angka indeks. Selanjutnya angka indeks dikenal dengan indeks harga. Indeks harga yang dipakai untuk mengukur inflasi pada umumnya yaitu indeks harga konsumen (IHK), di mana mencakup harga-harga komoditas yang umumnya dibeli oleh rumah tangga. Perubahan dalam IHK dimaksudkan untuk mengukur perubahan “biaya hidup” rumah tangga secara khusus.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{P_2 - P_1}{P_1} \times 100$$

Di mana,  $P_1$  adalah nilai indeks harga pada periode pertama

$P_2$  adalah nilai indeks harga pada periode kedua.

## 4.5. Ketenagakerjaan

### 4.5.1. Angkatan Kerja

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu “tenaga kerja” dan “bukan tenaga kerja”. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antar negara satu dengan negara lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk yang sudah berusia 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja (Dumairy, 1997: 74).

Tenaga kerja (*man power*) dibagi pula dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiunan, penderita cacat yang dependen).

Angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. Yang dimaksud dengan pekerja ialah orang-orang yang

mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus) memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Misalnya, petani yang sedang menanti panen atau wanita karir yang tengah menjalani cuti melahirkan. Adapun yang dimaksud dengan penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan. Penganggur semacam ini oleh Badan Pusat Statistik dinyatakan sebagai pengangguran terbuka.

Tenaga kerja yang bukan angkatan kerja dibedakan menjadi tiga subkelompok yaitu penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah; mengurus rumah tangga (tanpa mendapatkan upah); serta menerima pendapatan lain.

Jumlah angkatan kerja merupakan salah satu sumber daya bagi perekonomian dan menghasilkan tenaga kerja yang produktif tentunya akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan PDRB, karena tenaga kerja inilah yang ikut berpartisipasi di dalam proses produksi barang dan jasa yang terdapat di berbagai sektor perekonomian (Dumairy, 1997: 75).

#### **4.5.2. Tenaga Kerja dan Pengangguran**

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun, dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih 10 tahun dan tidak ingin bekerja. Jumlah penduduk dalam golongan (i)

dinamakan penduduk usia kerja dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (Sukirno, 1994: 19-20).

Uraian berikut menerangkan cara untuk menghitung pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Misalnya, dalam suatu perekonomian yang tergolong sebagai penduduk usia kerja berjumlah 14.891.761 orang, tetapi hanya sebanyak 9.124.458 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Di antara angkatan kerja tersebut sebanyak 8.528.571 orang mempunyai pekerjaan. Berdasarkan kepada data tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran adalah :

- Tingkat partisipasi angkatan kerja =  $\frac{9.124.458}{14.891.761} \times 100 = 61,3$  persen.
- Jumlah pengangguran =  $9.124.458 - 8.528.571 = 595.887$  orang.

Apabila diketahui jumlah pengangguran dan angkatan kerja, tingkat pengangguran dalam suatu waktu tertentu dapat ditentukan:

$$\text{Tingkat (persentase) pengangguran} = \frac{595.887}{9.124.458} \times 100 = 6,5 \text{ persen.}$$

## 4.6. Investasi

### 4.6.1. Definisi Investasi

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan salah satu dari komponen yang menentukan



tingkat pengeluaran agregat. Istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994: 107-108).

Dalam prakteknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi meliputi pengeluaran-pengeluaran berikut ini:

- 1). Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis perusahaan.
- 2). Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, dan bangunan-bangunan lainnya.
- 3). Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional.

#### **4.6.2. Jenis Investasi**

Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama (barang-barang modal) yang akan digunakan untuk proses produksi. Jenis investasi ini dibedakan lagi menjadi tiga komponen, yaitu investasi tetap perusahaan (*Business Fixed Investment*), investasi untuk perumahan (*Residential Construction*) dan investasi

perubahan bersih persediaan perusahaan (*Net Change in Business Inventory*). Investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, dan lain sebagainya (Mangkoesoebroto, 1991: 75).

#### 4.6.3. Investasi dan Tingkat Bunga

Seseorang atau perusahaan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi riil, harus mengetahui tingkat pengembalian dari investasi riil (*Marginal Efficiency of Capital = MEC = r*) yang diperoleh dari proyek investasi yang ada. Makin tinggi MEC dari suatu proyek investasi, makin besar pula keyakinan dilaksanakannya proyek investasi tersebut. Apabila MEC lebih besar dari tingkat bunga pinjaman, maka proyek investasi akan menguntungkan jika dilaksanakan.

$$r = \text{MEC} = \text{Internal Rate of Return (IRR)}$$

$$i = \text{Tingkat bunga / External Rate of Return (ERR)}$$

Untuk menggambarkan hubungan antara tingkat bunga ( $i$ ) dengan besarnya investasi ( $I$ ) yang akan dilaksanakan dapat dijalankan sebagai berikut: Misalnya, terdapat beberapa proyek investasi dan masing-masing proyek tersebut mempunyai MEC seperti yang terlihat pada tabel 4.1. Apabila tingkat bunga pinjaman yang terjadi adalah sebesar 15%, maka jenis investasi mesin dapat dilaksanakan, karena  $\text{MEC} > i$ , sedangkan jenis investasi lain (truk, komputer, dan gedung) tidak dilaksanakan. Jadi investasi yang terjadi adalah sebesar Rp. 12 juta. Apabila tingkat bunga pinjaman yang terjadi sebesar 12%, maka jenis investasi mesin dan truk

dapat dilaksanakan, sedangkan jenis investasi lain (komputer dan gedung) tidak dilakukan. Dengan demikian besarnya investasi yang terjadi adalah Rp. 47 juta (mesin + truk), begitu seterusnya apabila tingkat bunga lebih kecil.

TABEL 4.1.

## PROYEK INVESTASI DAN MEC

Jenis Investasi	Harga Investasi	MEC
Mesin	Rp. 12 juta	18%
Truk	Rp. 35 juta	14%
Komputer / unit	Rp. 7 juta	10%
Gedung	Rp. 72 juta	8%

Jadi hubungan antara investasi dengan tingkat bunga adalah negatif. Ini berarti bahwa apabila tingkat bunga turun, maka besarnya investasi yang diinginkan naik, begitu sebaliknya apabila tingkat bunga naik maka besarnya investasi yang diinginkan turun (Mangkoesoebroto, 1991: 77-78).

#### 4.7. Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

##### 4.7.1. Laju Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi ialah dapat menurunkan taraf kemakmuran golongan besar masyarakat, yang berwujud merosotnya upah riil para pekerja, terutama yang bergaji tetap.

Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk sekiranya laju inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Laju inflasi

cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Dengan laju yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi (penanaman modal) yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Dampak selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

#### **4.7.2. Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja, keduanya sangat berhubungan, di mana pertumbuhan angkatan kerja terjadi beberapa saat kemudian setelah adanya pertumbuhan penduduk. Secara tradisional, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, namun masih dipertanyakan apakah begitu cepatnya pertumbuhan penawaran angkatan kerja di negara-negara berkembang (sehingga banyak di antara mereka yang mengalami kelebihan tenaga kerja) benar-benar akan memberikan dampak positif atau pun negatif terhadap pembangunan ekonomi. Pada studi ini, mengambil kasus di Propinsi DIY, di mana Propinsi DIY sebagai kota pendidikan yang sering menciptakan angkatan kerja-angkatan kerja baru dalam komposisi yang besar, ada kemungkinan dari angkatan kerja baru tersebut lebih banyak orang yang menganggur dari pada orang yang bekerja. Jadi dengan banyaknya para penganggur yang ada akan membawa dampak yang negatif yaitu memperkecil output dan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan penduduk membantu meningkatkan aktivitas perekonomian, di mana diberengi dengan laju pembentukan modal dan kemajuan teknologi yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomis produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi, dan menciptakan sumber penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai, sehingga pada gilirannya akan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang tinggi.

#### **4.7.3. Penanaman Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Kapital (modal) adalah faktor produksi yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan, dalam hal ini PDRB. Modal ini terbentuk dari tabungan yang disisihkan dari tingkat pendapatan yang semakin meningkat, karena tabungan adalah sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi dan biasanya siap untuk diinvestasikan (penanaman modal). Artinya, Semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pula untuk menabung. Penanaman modal membawa kepada pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada. Jadi penanaman modal memberi dampak yang positif bagi awal pertumbuhan ekonomi dan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, akan terciptalah modal yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi berikutnya. Dalam studi ini, investasi yang dimaksud yaitu dalam bentuk penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

#### **4.8. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh. Dalam penelitian ini hipotesis diajukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dinyatakan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap PDRB di Propinsi DIY yang selanjutnya dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel laju inflasi diduga signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PDRB Propinsi DIY.
2. Variabel jumlah angkatan kerja diduga signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PDRB Propinsi DIY.
3. Variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) diduga signifikan dan berpengaruh positif terhadap PDRB Propinsi DIY.
4. Variabel jumlah penduduk diduga signifikan dan berpengaruh positif terhadap PDRB Propinsi DIY.
5. Variabel penanaman modal asing (PMA) diduga signifikan dan berpengaruh positif terhadap PDRB Propinsi DIY.
6. Laju inflasi, jumlah angkatan kerja, PMDN, jumlah penduduk dan PMA diduga secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB Propinsi DIY.